



KEBIJAKAN MONETER INDEPENDEN MENURUT IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Syamsuri¹, Nurul Rahmania², Setiawan Bin Lahuri³

^{1,2,3}Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Email Korespondensi: syamsuri@unida.gontor.ac.id,

nurulrahmania422022@gmhs.unida.gontor.ac.id,

binlahuri@unida.gontor.ac.id

Abstract

As the holder of the highest power, the government certainly has a series of strategies to design and realize the welfare of its people. The policies and development methods implemented are aimed at regulating and maximizing the country's economy. The government's role in the country's economy is realized through money spending policies and maintaining exchange rate stability. Therefore, exchange rate stability is very important in achieving price stability and the financial system. According to Ibn Khaldun, the government can make gold and silver the standard of value for money and monetary measures, so that they will be consistent in determining the price of money. Ibn Khaldun emphasized that if the economic system in a country is good and tries to maintain financial stability, it will have an impact on the existence and development of that country

Keywords: *Monetary Policy, Islamic Economics, Ibn Khaldun.*

Abstrak

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah tentu memiliki serangkaian strategi dalam merancang dan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan dan metode pengembangan yang diterapkan bertujuan untuk mengatur dan memaksimalkan perekonomian Negara. Peran pemerintah dalam perekonomian Negara direalisasikan melalui kebijakan pengeluaran uang dan menjaga kestabilan nilai tukar uang. Oleh karena itu, kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Menurut Ibnu Khaldun, pemerintah dapat menjadikan emas dan perak sebagai standar dari nilai uang dan standar moneter, sehingga akan konsisten dalam menentukan harga uang. Ibnu Khaldun menegaskan, apabila sistem ekonomi di suatu Negara baik dan berusaha menjaga stabilitas keuangan, maka akan berdampak pada eksistensi dan perkembangan dari Negara tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun.



Pendahuluan

Ajaran agama Islam memiliki keistimewaan dalam hal kepemilikan materi. Makna materi atau harta memiliki kesungguhan makna yaitu anugerah dari Allah SWT yang diamanahkan kepada hamba-Nya. Dalam menjaga dan menghasilkan fungsi dari harta tersebut, Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan prinsip-prinsip agar menjadi pegangan bagi umat dan pengikutnya, sehingga tujuan dari syai'ah dapat tercapai, dan jauh dari hal yang merugikan, baik di dunia dan di akhirat.

Harta dalam bentuk uang merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pembayaran hutang atau instrumen dalam pembelian barang dan jasa. Secara garis besar, uang merupakan alat yang memiliki nilai guna yang diproses dalam tukar menukar dengan barang ataupun jasa (Kasmir, 2001);(Amri & Gultom, 2022). Termasuk dalam ranah perekonomian, kebijakan ekonomi Islam sangat menekankan pada larangan dari kegiatan riba. Sebab dalam riba mencakup didalamnya bunga, baik dalam hal manifestasi, pengembalian pinjaman, dan apakah suku bungannya pada saat itu tinggi ataupun rendah (Chapra, 1990). Kebijakan Moneter merupakan asas kebijakan yang berfungsi untuk mengendalikan aktifitas dari sistem ekonomi makro memelihara keseimbangan harga dan inflasi, sehingga dapat menghasilkan keseimbangan dan strategi perencanaan berjalan sesuai dengan target (Fuad, n.d.);(Ramdani et al., 2022). Melihat adanya perbedaan diantara aspek tersebut, perlu diadakannya perkembangan pembahasan dan pemikiran lanjutan yang relevan dengan permasalahan yang terjadi.

Sehingga jika melihat daripada sistem kebijakan Moneter dalam Islam yaitu terlihat pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dimana kekuasaan tertinggi semata-mata berada pada tangan Allah SWT, sementara itu manusia hanyalah *khalifah* dan bukan pemilik sesungguhnya. Materi yang dimiliki oleh manusia hanya akan didapat atas izin pemilik harta yang hakiki yaitu Allah SWT, harta ataupun materi dalam ajaran Islam tidak untuk disimpan, sebab didalamnya terdapat hak dari orang miskin. Sifat individualisme dalam Islam harus dihapuskan, agar konflik dan perbedaan antar golongan dapat dihilangkan, sehingga sifat sukarela harus dimiliki pada setiap individu, pun dengan masyarakat yang kurang dalam hal materi (Karim, 2008);(Amri et al., 2022).

Jika melihat kepada sistem dan peraturan yang ada dalam ekonomi Islam, pembentukannya telah melalui banyak tingkatan proses, dari tahap demi tahap sehingga berhasil disimpulkan oleh para ekonom Islam hingga sampailah pada masa keemasannya. Sehingga hasil dari kerangka bangunan pemikiran dan konsep teori para ekonom Islam, dapat



menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif dari gagalnya perekonomian barat. Salah satu diantaranya adalah Ibnu Khaldun, yang dari hasil intelektualnya melahirkan teori ekonomi yang selaras dengan logika dan empiris manusia. Sehingga dalam hal pembangunan sistem ekonomi Islam diperlukan upaya untuk memahami teori dari pemikiran ilmuan Islam dalam bidang ekonomi pembangunan, sehingga akan melahirkan rumusan dan konsep kebijakan ekonomi yang selalu berkiblat kearah kesejahteraan umat.

Dalam Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjelaskan terkait teori nilai, teori keuangan, dan teori harga. Teori nilai. Bagi Ibnu Khaldun "laba yang didapatkan manusia merupakan nilai dari teralisasinya tenaga kerja manusia tersebut". Dengan begitu, kekayaan dari suatu Negara akan tidak dapat ditentukan dari banyak atau sedikitnya uang beredar di masyarakat, melainkan ditentukan dari tingkat produksi barang dan jasa, dan neraca pembayaran yang sehat. Sebab, neraca pembayaran yang sehat merupakan refleksi dari tingginya tingkat produktifitas.

Dari segi teori uang, Ibnu Khaldun menjadikan emas dan perak untuk menjadi ukuran nilai dan standard moneter, bahkan dapat dijadikan sebagai cadangan nilai. Hal tersebut dikarenakan emas dan perak tidak dapat diengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Khaldun, untuk menjamin terjaganya nilai uang tersebut, diberikan kepada penguasa.

Untuk teori harga, Ibnu Khaldun mendefinisikan harga sebagai hasil dari adanya permintaan dan penawaran. Sedangkan emas dan perak tidak berada dalam hokum tersebut, sebab emas dan perak merupakan standard moneter. Sehingga barang-barang lain akan mengalami fluktuasi harga tergantung pada keadaan pasar. Dimana jika terjadi kelangkaan barang maka harga akan tinggi, sedangkan jika terjadi kelimpahan barang maka harga akan rendah (Khaldun, 1994);(Said et al., 2022).

Oleh sebab itu, dalam mengendalikan perekonomian secara makro, kebijakan moneter, dengan memperhatikan ukuran standard moneter, menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki aturan perekonomian dalam peredaran uang. Upaya ini dilakukan dalam rangka memperoleh stabilitas dari segi harga dan inflasi (Turmudi, 2019). Sebab krisis moneter yang terjadi selama ini adalah berasal dari sistem konvensional (Fuad, n.d.);(Amri, 2022). Berangkat dari pemaparan diatas, penelitian ini akan berfokus untuk membahas mengenai pemikiran Ibnu Khaldun terkait kebijakan moneter dan relevansinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.



Tinjauan Pustaka

Dalam beberapa penelitian terkait kebijakan moneter dalam Islam seperti Fuad, n.d., Yusup et al., (2020), dan Purnomo (2019). memaparkan bahwa memiliki perbedaan tersendiri dengan sistem ekonomi lainnya, seperti dalam penelitian, sebab dalam hal implementasi dari kebijakan moneter dalam Islam akan menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan, sesuai dengan kajian (Ulum, 2016), dan (Annisa, 2017).

Pada sisi yang berlawanan dengan ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konvensional) kerap mendapatkan kritik pedas dari para ahli ekonom. Sebab dalam sistem ekonomi yang digaungkan oleh Adam Smith sarat akan Individualistis (*self interest*), sehingga menciptakan perbedaan dan kesenggangan antar sosial masyarakat, bahkan Max Weber dengan etika Protestannya, menghancurkan agama beserta dengan nilai-nilai ajarannya, hal ini didukung dalam penelitian oleh Salam (2011), Hakim (2016), dan Kambali (2015).

Sehingga, dengan lahirnya pemikiran dari para ekonom yang banyak menuangkan pikirannya untuk menghadirkan alternatif dan solutif dari masalah ekonomi. Eksplanasi ekonomi menurut Ibnu Khaldun cukup relevan untuk menjawab dari persoalan dari ekonomi konvensional. Ibnu Khaldun secara eksplisit dan Implisit mengevaluasi bahwa perilaku hidup yang materialistis menjadi titik turunya kehidupan ekonomi masyarakat, sampai dengan peradabannya menjadi runtuh dan hancur. Hal ini ditegaskan dalam penelitian Aryanti (2018).

Dengan teori yang positif terkait keuangan, tenaga kerja, produksi dan distribusi, moneter dan fiskal, dan teori lainnya, Ibnu Khaldun memberi patokan kepada pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan yaitu pemerintah, untuk memiliki tujuan agar menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Terkhusus untuk membantu dan memajukan perekonomian Indonesia.

Perubahan dalam mekanisme kebijakan moneter di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan system keuangan Indonesia yang terus mengalami perubahan structural sejak terjadinya krisis pada tahun 1997. Fakta diatas menggambarkan bahwa pentingnya pengaruh dari kebijakan moneter terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Sehingga untuk merealisasikan kebijakan tersebut perlu ditempuh melalui bank sentral sebagai pengarah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, agar sampai pada tujuan yang ditargetkan, salah satunya



adalah kestabilan harga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi (Warjiyo & Indonesia, 2017).

Dapat dikatakan bahwa krisis multimedimensi di Indonesia berdampak pada kegagalan pembangunan. Sedangkan Di Indonesia pembangunan sangat identik *development* atau *economic growth*. Sehingga apabila perekonomian terjadi inflasi, maka kebijakan stabilitasi akan menstimulasi agregat dan apabila keadaan perekonomian mengalami resesi, maka kebijakan mensitmulasi untuk permintaan agregat (Nurdin & Suyud, 2019).

Untuk melihat stabilitas moneter dari adanya inflasi, bank Indonesia akan menggunakan kebijakan otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, sehingga kondisi di sector akan stabil dan kenaikan harga dapat ditanggulangi. Sebab dari adanya kenaikan harga tinggi akan berpengaruh pada daya beli yang rendah dan sektor riil tidak dapat berfungsi dengan baik (WIJI, n.d.). Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia juga menjaga keseimbangan dari nilai tukar rupiah, dengan stabilnya nilai rupiah, akan berdampak pada kestabilan harga-harga didalam negeri dan penarikan bagi luar negeri. Sehingga memberikan dampak positif dalam pembangunan (Putra, 2015).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas system keuangan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan pengembangan ekonomi melalui keuangan syariah dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi, keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*) (<https://www.bi.go.id/>, n.d.). Oleh sebab itu, penelitian ini akan berusaha melakukan eksplorasi terkait bagaimana pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam mendiskripsikan teknik kebijakan moneter yang bermoral Islam dan merelevansikannya dengan perekonomian Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan metode kualitatif. Dalam proses pengumpulan data terkait informasi dan masalah penelitian dilakukan dengan mereview buku, jurnal, serta dengan memanfaatkan sumber lainnya yang linier dengan pembahasan. Metode Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti merupakan kunci utama instrumen (Sugiyono, 2013). Sehingga adapun tujuan yang ingin disampaikan pada kesimpulan



penelitian adalah tentang pemikiran Ibn Khaldun dalam kebijakan moneter dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Moneter Indonesia

Pengertian moneter dari segi bahasa latin, adalah *moneta* yang artinya adalah bagaimana siklus dari ketersediaan dan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi (Turmudi, 2019). Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya pengendalian ekonomi negara dari segi makro. Dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik dan teratur dengan pengaturan dalam peredaran uang, sehingga kestabilan pada harga menjadi pengukuran dalam mendeteksi tingkat inflasi (Ahmad, 2021);(Ramdani et al., 2021).

Sehingga Bank Indonesia menjadi pemain utama dalam pengambilan keputusan pelaksanaan dari kebijakan moneter. Serta memiliki fungsi untuk memelihara stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah uang dan pengaturan tingkat suku bunga yang beredar dilingkungan masyarakat. Karena sejatinya peredaran uang yang tidak terkontrol menghasilkan dampak yang kurang baik dalam kemakmuran suatu negara. Adapaun diantara dampak yang diakibatkan oleh peredaran uang atau tidak seimbangnya nilai mata adalah inflasi. Hal ini terjadi akibat dari adanya peningkatan terhadap biaya produksi yang kemudian menimbulkan kenaikan harga pada produk-produk yang dihasilkan. Untuk itu, perlindungan dalam daya beli perlu diperhatikan dan harus dilaksanakan dengan adil.

Adapun kebijakan moneter yang dikeluarkan untuk mengatur peredaran uang ditengah masyarakat, dapat digolongkan kedalam dua aspek (Ahmad, 2021), antara lain:

- a. Kebijakan moneter ekspansif: kebijakan yang diambil untuk meningkatkan sirkulasi uang.
- b. Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan yang diambil untuk meminimalkan jumlah uang yang beredar. Dalam perencanaan aplikasi kebijakan moneter yang dilakukan oleh lembaga moneter, tersusun target rencana untuk menggapai tujuan dari penetapan instrumen kebijakan moneter, diantaranya yaitu (Mahmud, 2009):
 - a) Kebijakan Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)
Dalam teknik penerapan kebijakan ini yaitu dengan kebijakan jual beli surat berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika supply uang terjadi, maka bank sentral melakukan pembelian obligasi tersebut dan bank



sentral akan melakukan penurunan peredaran uang serta menjual kembali obligasi apabila terjadi hal yang sebaliknya.

b) Penentuan Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*)

Dalam teknik ini, bank sentral mengeluarkan uang dalam kuantitas yang banyak, hal ini akan terjadi akibat penentuan angka rasio minimum antara uang tunai dan kewajiban giral bank atau yang disebut juga dengan minimum legal *reserve ratio*. Bank sentral mengatur dalam mememanajementkan jumlah cadangan dana bank pada pemerintah.

c) Penentuan Suku Bunga Diskon (*Discount Rate*)

Dalam kebijakan pemberian *Discount Rate* dari bank sentral kepada bank komersial mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat keuntungan dari bank komersial itu sendiri.

d) *Moral Suasion*

Kebijakan ini merupakan teknik yang dilakukan oleh bank sentral untuk menghimbau terhadap moral bank.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentu memiliki tujuan dari target yang telah direncanakan. Tujuan dari target tersebut terkandung dalam UU no. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Diantaranya yaitu: Stabilitas ekonomi, kesempatan kerja meningkat, kestabilan harga barang dari waktu ke waktu, stabilitas dalam neraca pembayaran Internasional, menjaga stabilitas harga serta mengupayakan pertumbuhan ekonomi, dan instrumen kebijakan moneter (Ahmad, 2021).

Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Perubahan dalam mekanisme kebijakan moneter di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan system keuangan Indonesia yang terus mengalami perubahan structural sejak terjadinya krisis pada tahun 1997. Fakta diatas menggambarkan bahwa pentingnya pengaruh dari kebijakan moneter terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Sehingga untuk merealisasikan kebijakan tersebut perlu ditempuh melalui bank sentral sebagai pengarah dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, agar sampai pada tujuan yang ditargetkan, salah satunya adalah kestabilan harga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi (Warjiyo & Indonesia, 2017).

Dapat dikatakan bahwa krisis multimedimensi di Indonesia berdampak pada kegagalan pembangunan. Sedangkan Di Indonesia pembangunan sangat identik development atau *economic growth*. Sehingga apabila perekonomian terjadi inflasi, maka kebijakan stabilitasi akan menstimulasi agregat dan apabila keadaan perekonomian



mengalami resesi, maka kebijakan mensitmulasi untuk permintaan agregat (Nurdin & Suyud, 2019).

Untuk melihat stabilitas moneter dari adanya inflasi, bank Indonesia akan menggunakan kebijakan otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, sehingga kondisi di sector akan stabil dan kenaikan harga dapat ditanggulangi. Sebab dari adanya kenaikan harga tinggi akan berpengaruh pada daya beli yang rendah dan sektor riil tidak dapat berfungsi dengan baik (WIJI, n.d.). Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia juga menjaga keseimbangan dari nilai tukar rupiah terhadap uang asing. Dengan stabilnya nilai rupiah, akan berdampak pada kestabilan harga-harga didalam negeri dan penarikan bagi luar negeri. Sehingga memberikan dampak positif dalam pembangunan (Putra, 2015). Selain terjaganya stabilitas ekonomi, terkendalinya neraca pembayaran melalui adanya perubahan nilai kurs rupiah dapat diatasi (Hadi & Romli, 2020).

Secara umum, kebijakan moneter diharapkan dapat bersama-sama untuk menanggulangi tingkat pengangguran dan inflasi. Seperti yang diketahui bahwa inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh satu sama lain, dimana akan berdampak pada menurunnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga memicu timbulnya kemiskinan dan masalah social lainnya (Syarun, 2016). Oleh sebab itu, sebab tingkat inflasi dalam suatu negara menjadi ukuran dari baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu Negara (Aulia et al., 2020). Dan disinilah peran kebijakan moneter untuk membantu menyempurnakan kerangka operasi moneter dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan neraca pembayaran yang paten (Anasyha, 2020).

Namun, relisasi dari progress tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan strategi, sehingga menyebabkan timbulnya kontradiktif. Misalnya, jika bank sentral mengeluarkan ekspansi moneter guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja, maka strategi tersebut akan mempengaruhi terkait keuntungan dari kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Dan sebaliknya, apabila kebijaksanaan moneter yang ketat dapat membantu untuk mencapai kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran, maka kebijakan tersebut akan mengakibatkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan pengangguran meningkat (Hadi & Romli, 2020).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan stabilitas system keuangan di Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan pengembangan ekonomi melalui keuangan syariah dengan mengacu kepada prinsip dan



nilai-nilai ekonomi, keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktivitas, dan tata kelola yang baik (*governance*) (<https://www.bi.go.id/>, n.d.).

Teori Kebijakan Moneter Ibnu Khaldun

a) Kebijakan Moneter

Dari karya-karya yang lahir dari hasil pemikiran Ibnu Khaldun sangat beragam dan luas. Termasuk didalamnya nilai-nilai dalam pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produk, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran dan sebagainya (Januari, 2016, p. 250). Salah satu karya Ibnu Khaldun yang hingga saat ini menjadi pedoman dalam segala bidang ekonomi adalah *Maqaddimah*, yang keluar pada abad ke-14 dan diterjemahkan keberbagai macam bahasa. Didalamnya terkandung banyak prinsip pikiran dan fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat, serta sistem pemerintah dan politik. Jika mengerucutkan kearah kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun mengenai teori kebijakan moneter, masih terbilang terbatas. Namun, deskripsi terkait peran uang dalam sistem komoditas, Ibnu Khaldun menjelaskannya dengan sangat tepat.

Konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang kebijakan moneter beranggapan bahwa, peristiwa peredaran uang bukan menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas kegiatan dari perekonomian. Namun, faktor dari terjadinya volume peredaran uang merupakan akibat dari penggunaan modal, motif keuntungan, organisasi dan upaya social (Januari, 2016, p. 258). Untuk mendukung konsep teori moneter ini, Ibnu Khaldun memvisualkannya kedalam kondisi suatu negara yang mana menjadi industri tambang emas, sebagi sumber dari penyaluran uang, namun hasil yang diberikan memposisikan negara tersebut kedalam negara yang tidak makmur. Selanjutnya, Ibnu Khaldun memberikan keterangan bahwa, perubahan dari ekspansi pada tingkat aktivitas perekonomian, merupakan hasil dari perubahan keseimbangan rill terhadap permintaan. Dan tekanan terhadap inflasi terjadi akibat dari peningkatan permintaan akan saldo nominal.

Sehingga Ibnu Khaldun menyatakan bahwa inflasi bukanlah akibat dari fenomena moneter. Namun, permintaan dan tekanan terhadap biayalah yang menjadi faktor dari inflasi. Untuk itu, teori



kebijakan moneter Ibnu Khaldun bertolak belakang dengan teori kuantitas uang. “.....uang yang dihabiskan dalam setiap pasar, sesuai dengan volume bisnis yang dilakukan didalamnya...”(Khaldun, 1994, p. 273).

Sehingga dapat diuraikan bahwa pemikiran moneter Ibnu Khaldun berhubungan dengan pemahaman tentang fungsi uang, karena uang memiliki kunci penting dalam aktivitas komoditi dan permintaan transaksi akan uang. Kunci penting dari Ibnu Khaldun adalah uang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi secara umum.

b) Teori Permintaan dan Penawaran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, fungsi uang akan sangat penting perannya, ketika berda dalam sirkulasi komoditi dan permintaan terhadap transaksi akan uang. Dalam buku *Muqqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perubahan akan harga terjadi dari adanya selisih dari permintaan yang tinggi dan akan mengalami penurunan apabila permintaan rendah. Dan hal ini telah disadari Ibnu Khaldun terlebih dahulu jauh sebelum teori Max di temukan.(Khaldun, 1994, p. 259).

“.....Jika manufaktur berada dalam permintaan dan biaya terpenuhi, maka produksi akan mirip dengan barang-barang yang dibawa untuk dijual. Oleh karena itu, orang akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari bahwa profesi untuk mencari nafkah. Namun, jika barang tidak dalam permintaan dan biaya tidak terpenuhi, maka orang tidak akan belajar profesi itu sehingga akan diabaikan.....”(Khaldun, 1994, p. 425).

Ibnu Khaldun juga memberikan tiga landasan dasar dalam pembangunan dan peradaban manusia, yaitu, berdasarkan kepada manufaktur, perdagangan, dan berdasarkan kepada sifat manusia. Ibnu Khaldun pun memberikan gagasan bahwa, dalam aktivitas ekonomi, manusia dituntut untuk terlibat dalam berprofesi sesuai dengan status pasar. Profesi akan tersedia apabila terjadi suatu permintaan dan kebutuhan. Akan tetapi negara akan melemah apabila pembangunan regresi dan penduduk berkurang. Maka, hal ini akan menurunkan kuantitas kekayaan dan manusia akan membutuhkan kebutuhannya hanya untuk mengurangi profesi yang merupakan hasil dari kemewahan (Khaldun, 1994, p. 429).



Relevansi Kebijakan Moneter Menurut Ibnu Khaldun Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia

Suatu kebijakan yang dikeluarkan terjadi karena adanya akibat dari suatu gejala yang dialami tidak seimbang. Pada saat inflasi terjadi akibat dari adanya peredaran uang yang tidak sehat. Yaitu, nilai nominal dari uang yang dicetak tidak stabil dengan logam yang kandungannya, akibatnya jual beli emas dan perak dan barang yang lainnya menurun. Namun, terjadinya inflasi kondisi pada saat ini disebabkan dari dua faktor, yaitu, pada tingkatan permintaan dan tuntutan terhadap biaya produksi. Hal ini, terjadi karena adanya total kuantitas permintaan berlebihan dan mengubah tingkatan harga. Apabila permintaan barang dan jasa naik, maka akan menyebabkan faktor-faktor produksi melonjak. Dengan demikian, maka harga dari total faktor produksi pun meningkat (*Sasongko, Agung, Kebijakan Moneter Independen Ala Ibnu Khaldun, Republika. Co. Id, 2019, n.d.*).

Kontribusi pemikiran Ibnu Khaldun yang disajikan untuk pemerintah yaitu kuantitas uang yang akan dicetak harus memperhatikan volume uang agar harga yang ditetapkan dapat adil. Namun, uang yang telah beredar menurut Ibnu Khaldun untuk tidak ditarik dan dibatalkan, namun, disarankan untuk mengeluarkan uang yang sesuai dengan nilai riil. (Lestari, 2015) Untuk itu, dalam setiap negara harus memiliki sebuah lembaga yang berdarma khusus dalam memantau sirkulasi moneternya. Dalam posisi Indonesia, lembaga yang mengambang tugas khusus tersebut adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memegang tiga pokok penting dalam sirkulasi perekonomian di Indonesia, diantaranya adalah moneter, perbankan dan pembayaran. Hal ini menjadi syarat penentuan kesuksesan atas capaian dari target yang telah direncanakan (Hadi & Romli, 2020).

Dalam pembahasan ekonomi, terdapat dua macam standar moneter/uang yaitu standar barang (*commodity standard*) dan standar kepercayaan (*fiat standard*). Standar barang merupakan sistem moneter di mana nilai beli uang sama dengan berat tertentu dari suatu barang (emas, perak dan sebagainya). Standar barang, dapat diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu standar emas, standar perak dan standar kembar (emas dan perak). Sedangkan standar kepercayaan yaitu sistem moneter yang menilai beli uang tidak dari berat tertentu dari barang (logam), namun berlandaskan pada kepercayaan masyarakat untuk mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran (Iswardono, 1996).

Ibnu Khaldun, ikut menuangkan pemikirannya kedalam kebijakan moneter yang dilakukan oleh suatu negara termasuk didalamnya



Indonesia. Beliau memberi gagasan bahwa uang bukan tolak ukur yang utama dalam suatu Negara. Namun, tahap produktivitas dan tingkat neraca pembayaran yang positif yang menjadi tingkat ukuran suatu negara. Untuk itu, saran dan arahan Ibnu Khaldun bahwa suatu negara untuk memulai pemanfaatan uang berstandar emas dan perak (*the gold bullion standard*) (Khaldun, 1994, p. 274). Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini setuju bahwa konsep Ibnu Khaldun dalam kebijakan moneter di Indonesia, dengan penentuan standar nilai uang. Dimana penggunaan emas dan perak tidak mutlak untuk dijadikan sebagai mata uang, namun harus dijadikan sebagai standar nilai uang.

Kesimpulan

Dari konsep uang yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa uang menjadi ukuran suatu harga, alat untuk bertransaksi serta alat untuk simpanan. Ibnu Khaldun menggagas bahwa uang menjadi ukuran nilai dari kuantitas uang, dalam artian uang tidak harus dalam bentuk emas atau perak. Namun, penciptaan uang pada suatu negara dilihat dari nilai harta cadangannya pada suatu negara. Karena pada dasarnya Ibnu Khaldun dengan tegas menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak dihitung dari kuantitas uang yang ada pada negara tersebut, namun, tingkat produksi dan neraca pembayaran positif. Dalam kebijakan moneter Ibnu Khaldun memberi suatu konsep yang relevan dengan kondisi perekonomian dalam Indonesia, hal ini disebabkan karena Indonesia kerap mengalami krisis yang berdampak dari adanya pemanfaatan dan aplikasi dari sistem kapitalistik, yang dalam standarisasi aplikasinya menggunakan uang hampa tanpa adanya tolak ukur terhadap emas dan perak. Oleh karena itu, apabila suatu negara mampu menjadikan emas sebagai standar keuangannya, maka akan berdampak pada terjaganya nilai pasar serta nilai nominal pada uang akan stabil. Dalam hal ini, uang kertas dan uang kredit dalam bank pun mampu ditebusan dengan emas, dengan demikian hal ini akan menjaga stabilitas terhadap nilai dari alat tukar lainnya.

Saran

Dari penelitian terkait moneter dari konsep pemikiran Ibnu Khaldun, maka penulis memberikan saran sebagai kontribusi dalam memperbaiki stabilitas negara Indonesia, yaitu:

1. Dari kebijakan pemerintah harus meningkatkan kebijakan dalam meregulasikan terkait pengedaran uang. Kebijakan tersebut harus dijadikan pokok dalam segala aktivitas individu dalam negara dan



universal, oleh sebab itu negara harus menjaga nilai uang agar terhindar kehilangan nilai dan fungsi

2. Selain pemerintah, rakyat dalam negara pun harus memahami fungsi dari uang yang sesungguhnya. Sehingga hal ini akan membantu dalam menciptakan kesejahteraan kehidupan dan perekonomian rakyat. Namun, apabila terjadinya moneter, negara beserta dengan rakyatnya akan mampu menghadapinya dan mendapatkan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2021). *Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan dan Intrumennya*. Gramedia.
- Amir Mahmud, R. (2009). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on costumer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 10.
- Amri, A., & Gultom, M. S. (2022). Gambaran harga saham ditinjau dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga: Studi kasus perusahaan yang terdaftar di indeks Iq45. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(2), 22.
- Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and Validation of Financial Management Behavior (FMB) Scale in Postgraduate Students. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 22(2), 189. <https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006>
- Anasyha, F. P. (2020). *Pengaruh nilai tukar, suku bunga dan inflasi terhadap indeks harga saham sektor properti dan real estate di bursa efek indonesia*. Universitas muhammadiyah prof. Dr. Hamka.
- Annisa. (2017). *Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam*. 1(2).
- Aryanti, Y. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun; Pendekatan Dinamika Sosial Ekonomi Dan Politik. *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 2(2). <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1256>
- Aulia, Rts. I. T., Hodijah, S., & Umiyati, E. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2001-2017. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 9(1), 26–34. <https://doi.org/10.22437/jels.v9i1.11946>
- Azwar Karim (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Edisi Ke-e). Rajawali Press, Ekonomi Islam.
- Fuad, A. (n.d.). Kebijakan moneter islam. *Jurnal Syariah*.



- Hadi, S., & Romli, Moh. (2020). Relevansi Konsep Uang Dalam Perspektif Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Moneter Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(2), 167–181. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i2.115>
- Hakim, R. (2016). *Islamic Economists in The Early 21 st Century View ' s on Business Ethics*. 1(1), 1–14. <https://www.bi.go.id/>. (n.d.). *Fungsi utama moneter pengembangan ekonomi cetak-biru*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pengembangan-ekonomi/cetak-biru/Default.aspx>
- Iswardono. (1996). *Uang dan Bank*. BPFE.
- Januari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kambali, M. (2015). Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No.(2), 1–14. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Kasmir. (2001). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001).
- Khaldun, I. (1994). Mukaddimah. In *Khazanah Intelektual Islam*.
- Lestari, E. P. (2015). Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Pada Masa Kekinian. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Muhammad Umer Chapra. (1990). Towards a Just Monetary System. In *JKAU: Islamic Econ* (Vol. 2, Issue 1).
- Nurdin, S., & Suyud, M. (2019). Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 119–127. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i1.11473>
- Purnomo, J. H. (2019). *Uang dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam*. 1, 80–100.
- Putra, M. U. M. (2015). Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1), 41–50. <https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224>
- Ramdani, Z., Amri, A., & Warsihna, J. (2021). Perilaku manajemen keuangan karyawan selama pandemi covid-19: Sebuah studi awal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 170–179.
- Ramdani, Z., Hadiana, D., Amri, A., Warsihna, J., Widodo, W., Chandra, D. T., & Sopandi, E. (2022). The mediating role of attitude in the correlation between creativity and curiosity regarding the performance of outstanding science teachers. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(3), 8.



- Said, A., Susanto, E., & Amri, A. (2022). Analisis penerapan sistem pengelolaan dana terpadu Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13, 15.
- Salam, A. (2011). Interrelasi antara etika dan sistem ekonomi (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2), 31. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).31-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).31-44)
- Sasongko, Agung, *Kebijakan Moneter Independen ala Ibnu Khaldun, Republika. Co. Id, 2019.* (n.d.).
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.*
- Syarun, M. M. (2016). Inflasi, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 27–44.
- Turmudi, I. (2019). *Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Islam.* 74–90.
- Ulum, B. dan M. (2016). Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA)*, 1(September), 17–32.
- Warjiyo, P., & Indonesia, P. P. D. S. K. B. (2017). *Kebijakan Moneter di Indonesia.* Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- WIJI, N. (n.d.). *Teknologi Perbankan.* Graha Ilmu.
- Yusup, D. K., Badriyah, M., Suyandi, D., & Asryad, A. (2020). *Pengendalian Inflasi, Moneter , dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.* 1–10.

